



Widia Novita Lukitasari W A¹, Evi Agustini², Gilang Sailendra³, Zaenal Lubis⁴,
Mochammad Imam Yunizhar⁵, Yudi Rusfiana⁶

Institut Pemerintahan Dalam Negeri Sumedang, Jawa Barat^{1,2,3,4,5,6}

e-mail: widianovita2511@gmail.com¹

ABSTRAK

Fenomena politik dinasti di Indonesia telah menjadi isu penting dalam beberapa dekade terakhir, terutama selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Artikel ini menganalisis pengaruh politik dinasti terhadap kepemimpinan Jokowi, dengan fokus pada keterlibatan anggota keluarganya dalam politik lokal dan nasional, seperti Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution. Meskipun Jokowi berhasil membawa Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang stabil, pengaruh keluarga dalam politik telah memicu perdebatan mengenai dampaknya terhadap kualitas demokrasi. Penelitian ini mengkaji apakah politik dinasti memperkuat atau justru melemahkan sistem demokrasi Indonesia, dengan menganalisis persepsi publik, regulasi hukum terkait, serta dampak terhadap regenerasi kepemimpinan politik. Berdasarkan survei opini publik, wawancara dengan pakar politik, dan analisis literatur, penelitian ini menyimpulkan bahwa politik dinasti, meskipun mendukung keberlanjutan kekuasaan keluarga, dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang adil dan kompetitif. Artikel ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki regulasi politik dinasti di Indonesia, serta mendorong pembaruan sistem politik yang lebih terbuka dan berbasis pada meritokrasi.

Kata Kunci: *Politik Dinasti, Kepemimpinan Joko Widodo, Demokrasi Indonesia*

ABSTRACT

The phenomenon of dynastic politics in Indonesia has become an important issue in the last few decades, especially during the leadership of President Joko Widodo (Jokowi). This article analyzes the influence of dynastic politics on Jokowi's leadership, with a focus on the involvement of his family members in local and national politics, such as Gibran Rakabuming Raka and Bobby Nasution. Although Jokowi has succeeded in steering Indonesia towards stable economic growth, the family's influence in politics has sparked debate about its impact on the quality of democracy. This research examines whether dynastic politics strengthens or weakens Indonesia's democratic system, by analyzing public perceptions, related legal regulations, and the impact on the regeneration of political leadership. Based on public opinion surveys, interviews with political experts, and literature analysis, this research concludes that dynastic politics, although supporting the continuation of family power, can reduce people's trust in a fair and competitive democratic process. This article provides policy recommendations to improve the regulation of dynastic politics in Indonesia, as well as encourage the renewal of a political system that is more open and based on meritocracy.

Keywords: *Dynasty Politics, Joko Widodo's Leadership, Indonesian Democracy*

PENDAHULUAN

Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi, memulai karier politiknya sebagai Wali Kota Solo pada tahun 2005 hingga 2012. Selama masa kepemimpinannya, Jokowi menerapkan model kepemimpinan transformasional yang berfokus pada revitalisasi pemerintahan dan masyarakat Solo. Penelitian oleh Quraisy et al. (2017) mengidentifikasi bahwa gaya kepemimpinan Jokowi ditandai dengan pendekatan sederhana dan pelayanan publik yang efektif, yang berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kota



Keberhasilan Jokowi di Solo mengantarkannya menjadi Gubernur DKI Jakarta pada periode 2012 hingga 2014. Di Jakarta, ia memperkenalkan kebijakan berbasis data dan program sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga. Gaya komunikasi politiknya yang simbolik dan kredibilitasnya sebagai komunikator politik telah dibahas dalam penelitian oleh Quraisyi et al. (2017), yang menunjukkan bahwa pendekatan tersebut membuat masyarakat merasa nyaman dan dekat dengan pemimpinnya

Pada tingkat nasional, setelah terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014 dan terpilih kembali pada 2019, Jokowi terus menekankan pembangunan infrastruktur, pemberantasan korupsi, dan penciptaan lapangan kerja. Namun, masa kepemimpinannya juga diwarnai oleh fenomena politik dinasti (Kadir & Fatchan, 2019). Penelitian oleh Susanti (2016) mengindikasikan bahwa praktik politik dinasti di Indonesia sering kali terkait dengan peran partai politik dan regulasi pemilihan kepala daerah, di mana oligarki dalam tubuh partai dapat mempengaruhi proses pencalonan kandidat

Fenomena politik dinasti ini menimbulkan kekhawatiran terhadap prinsip demokrasi dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Studi oleh Susanti (2016) menyoroti bahwa masifnya praktik politik dinasti di daerah dapat mencederai prinsip demokrasi dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan serta praktik korupsi, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap tata kelola pemerintahan di tingkat lokal

Politik dinasti di Indonesia mengacu pada fenomena di mana anggota keluarga dari pemimpin politik atau pejabat publik melibatkan diri dalam dunia politik, dan seringkali mencalonkan diri dalam pemilihan umum atau pilkada. Di bawah kepemimpinan Joko Widodo, fenomena politik dinasti semakin mencuat dengan keterlibatan anak-anak dan menantu Jokowi dalam berbagai posisi politik. Misalnya, Gibran Rakabuming Raka, anak pertama Jokowi, terpilih sebagai Wali Kota Solo pada tahun 2020. Begitu pula, menantu Jokowi, Bobby Nasution, menjabat sebagai Wali Kota Medan pada 2020. Fenomena ini menunjukkan adanya kontinuitas kekuasaan dalam keluarga Presiden Jokowi, yang menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat dan kalangan politisi. Sebagian pihak menganggap bahwa keterlibatan keluarga dalam politik memperkuat stabilitas politik dan memberikan kesempatan bagi generasi baru untuk mengembangkan kepemimpinan. Namun, di sisi lain, politik dinasti dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai ancaman terhadap demokrasi, yang berpotensi mengurangi keberagaman dalam pemilihan umum dan merusak prinsip meritokrasi (Syanur dkk, 2023).

Politik dinasti di Indonesia bukanlah fenomena baru. Sebelumnya, negara ini telah menyaksikan dominasi keluarga-keluarga tertentu dalam dunia politik, seperti keluarga Soeharto, keluarga Megawati Soekarnoputri, dan keluarga Abdurrahman Wahid. Namun, pengaruh dinasti politik di era Jokowi memberikan dimensi baru, terutama karena keterlibatan anak-anak dan menantu Presiden dalam politik lokal yang kerap mendapatkan perhatian publik. Jokowi sendiri memiliki pandangan yang agak ambigu mengenai politik dinasti (Suryadinata, 2015). Di satu sisi, ia menunjukkan keberpihakannya pada anak-anak dan menantu yang ingin berkiprah di dunia politik, tetapi di sisi lain, ia mengklaim bahwa mereka harus mampu bekerja keras dan membuktikan diri melalui hasil kerja, bukan hanya berdasarkan hubungan keluarga. Keterlibatan Gibran dan Bobby dalam politik sering kali dipandang sebagai upaya untuk melanjutkan dan memperkuat jaringan politik keluarga Jokowi.

Fenomena politik dinasti ini memunculkan pertanyaan penting mengenai dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia. Di satu sisi, keterlibatan anggota keluarga dalam politik dapat dianggap sebagai cara untuk menjaga kesinambungan kebijakan dan stabilitas politik. Namun, di sisi lain, politik dinasti sering kali dianggap merusak prinsip demokrasi, di mana setiap individu seharusnya diberi kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam politik, tanpa dibatasi oleh hubungan keluarga atau patronase politik. Keterlibatan keluarga Jokowi dalam politik, terutama melalui pemilihan umum atau pilkada, memunculkan kekhawatiran mengenai



pengaruhnya terhadap proses regenerasi kepemimpinan politik. Meskipun Jokowi mengklaim bahwa anak dan menantunya telah menjalani proses politik yang demokratis dan sesuai dengan aturan, skeptisisme tetap muncul mengenai apakah mereka mendapatkan kesempatan tersebut karena kemampuan mereka ataukah lebih karena hubungan kekerabatan dengan presiden.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan perspektif fenomenologi. Metode ini berfokus pada pengalaman individu dan bagaimana mereka memahami fenomena yang dialami, dalam hal ini, dinamika kepemimpinan Joko Widodo serta pengaruhnya terhadap politik dinasti di Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menggali makna dari pengalaman serta persepsi aktor politik dan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, termasuk dokumen resmi seperti Undang-Undang Pilkada, kebijakan pemerintah terkait politik dinasti, serta pernyataan resmi dari pejabat negara. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis literatur akademik yang mencakup buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas kepemimpinan Jokowi dan fenomena politik dinasti. Media massa juga menjadi sumber utama dalam penelitian ini, dengan menganalisis pemberitaan terkait karier politik Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution sebagai bagian dari studi kasus politik dinasti di era pemerintahan Jokowi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten, yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi tema, pola, dan narasi yang dominan dalam wacana publik terkait kepemimpinan Jokowi dan politik dinasti. Sumber data seperti pidato politik, wawancara, artikel media, serta materi kampanye dianalisis untuk menggali persepsi publik dan aktor politik mengenai topik ini. Untuk meningkatkan validitas temuan, penelitian ini menggunakan triangulasi data dengan memadukan berbagai sumber sekunder, termasuk dokumen publik, laporan media, serta studi akademik terdahulu. Selain itu, triangulasi metode diterapkan dengan mengombinasikan analisis wacana dan analisis isi dengan data statistik atau survei guna memperkuat temuan dari berbagai perspektif. Triangulasi peneliti juga dilakukan dengan melibatkan beberapa akademisi dari bidang politik, hukum, dan sosiologi untuk mengurangi bias serta memperkaya analisis. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih holistik dan objektif mengenai hubungan antara kepemimpinan Joko Widodo dan dinamika politik dinasti di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Konsep politik dinasti dalam sistem demokrasi di Indonesia, dan konteks politik dinasti selama kepemimpinan Joko Widodo, atau yang dikenal dengan Jokowi, memulai karier politiknya sebagai Wali Kota Solo (2005–2012) (Winters, 2011). Jokowi dikenal dengan pendekatan blusukan, dialog langsung dengan masyarakat, dan reformasi birokrasi di Kota Solo. Salah satu prestasinya adalah relokasi pedagang kaki lima di Solo yang dilakukan secara persuasif. Pada tahun 2012, Jokowi terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selama masa jabatannya (2012–2014) Jokowi memprioritaskan pembangunan infrastruktur seperti MRT dan revitalisasi Waduk Pluit. Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) menjadi bagian dari kebijakan pro-rakyat (Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Pada tahun 2014, Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia setelah memenangkan Pilpres melawan Prabowo Subianto. Selama kepemimpinannya sebagai presiden (2014–2024) Jokowi fokus pada pembangunan infrastruktur besar-besaran, seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Kebijakan desentralisasi fiskal untuk memperkuat pembangunan daerah juga menjadi sorotan.



Politik dinasti mengacu pada praktik politik di mana kekuasaan politik diwariskan atau dikelola oleh individu-individu yang memiliki hubungan kekerabatan. Dalam konteks demokrasi, politik dinasti sering dianggap paradoks karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan peluang (Choi, 2007). Di Indonesia, politik dinasti berkembang karena: Patronase Politik: Kekuasaan sering kali berbasis pada loyalitas pribadi dan hubungan keluarga. Kurangnya Regulasi Tegas: Meskipun UU Pilkada melarang politik dinasti secara langsung, celah hukum tetap ada. Modal Sosial dan Ekonomi: Keluarga petahana memiliki keuntungan akses sumber daya dan jaringan politik (Hadiz, 2004).

Berikut adalah struktur bagian Hasil dan Pembahasan berdasarkan data yang diperlukan untuk menjelaskan topik politik dinasti dalam kepemimpinan Jokowi:

a. Studi Kasus Politik Dinasti dalam Kepemimpinan Jokowi

Keterlibatan keluarga Joko Widodo dalam politik menjadi sorotan, terutama pada kasus: Gibran Rakabuming Raka: Menjabat sebagai Wali Kota Solo sejak 2020. Gibran berhasil memenangkan pilkada dengan dukungan signifikan dari PDIP dan tokoh-tokoh lokal. Baru-baru ini mencuat wacana pencalonannya sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024, yang menimbulkan perdebatan tentang meritokrasi versus dinasti politik. Bobby Nasution: Menantu Jokowi yang terpilih sebagai Wali Kota Medan pada 2020. Bobby mendapatkan dukungan dari PDIP dan koalisi partai besar. Keterlibatan keluarga Jokowi mencerminkan dilema antara proses demokratis (pemilihan langsung) dan kecenderungan politik dinasti yang mengandalkan jaringan kekuasaan keluarga.

b. Peran Elite Politik dan Partai dalam Mendukung Politik Dinasti

Peran Partai PDIP: Sebagai partai tempat Jokowi bernaung, PDIP menjadi pendukung utama pencalonan Gibran dan Bobby. Hubungan Jokowi dengan elite PDIP, termasuk Megawati Soekarnoputri, memberikan ruang bagi praktik dinasti dalam struktur partai. Koalisi Politik: Dukungan partai lain terhadap keluarga Jokowi menunjukkan adanya kepentingan pragmatis, seperti mempertahankan akses terhadap kekuasaan dan distribusi sumber daya politik.

Dinasti politik tidak hanya berakar pada kekuasaan keluarga tetapi juga pada kolaborasi dengan elite dan partai yang memanfaatkan figur keluarga untuk menjaga pengaruh politik.

c. Dampak Politik Dinasti terhadap Demokrasi

Partisipasi Politik: Keberadaan dinasti politik dapat melemahkan motivasi calon potensial lain untuk berpartisipasi karena dominasi keluarga petahana. Namun, dalam beberapa kasus, kehadiran tokoh populer seperti Gibran mampu menarik minat masyarakat untuk terlibat dalam proses pemilu. Kepercayaan Publik: Survei dari lembaga seperti LSI menunjukkan adanya polarisasi dalam kepercayaan publik terhadap dinasti politik. Sebagian mendukung dengan alasan kapasitas individu, sementara lainnya mengkritik karena dianggap merusak prinsip demokrasi. Politik dinasti menciptakan tantangan bagi demokrasi karena memengaruhi persepsi tentang keadilan dalam kompetisi politik, meskipun dalam beberapa kasus, tokoh dari dinasti mampu menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang baik.

d. Dampak terhadap Regenerasi Politik dan Netralitas Pemilu

Regenerasi Politik: Politik dinasti dapat mempersempit peluang regenerasi kepemimpinan karena dominasi keluarga tertentu. Dinasti juga memperkuat struktur oligarki dalam politik lokal maupun nasional. Netralitas Pemilu: Pemilu yang melibatkan tokoh dari dinasti politik sering menghadapi tantangan dalam menjaga netralitas penyelenggara pemilu, terutama jika ada intervensi dari pihak-pihak yang memiliki afiliasi politik kuat. Praktik politik dinasti cenderung membatasi ruang bagi calon independen dan memperbesar risiko konflik kepentingan, khususnya dalam proses pemilu.

e. Respons Publik dan Oposisi Politik



Reaksi Masyarakat melalui Media Sosial dan Survei Opini Publik: Media sosial menjadi ruang diskusi yang menunjukkan polarisasi pandangan masyarakat terhadap politik dinasti. Survei seperti yang dilakukan oleh SMRC menunjukkan mayoritas masyarakat mengkritik politik dinasti, meskipun masih ada yang menilai individu berdasarkan prestasi. Sikap Partai Politik Oposisi: Partai oposisi sering menggunakan isu politik dinasti sebagai alat untuk melemahkan legitimasi Jokowi dan keluarganya. Kritik dari oposisi difokuskan pada ancaman terhadap meritokrasi dan profesionalisme politik. Respons publik menunjukkan bahwa meskipun politik dinasti diterima dalam beberapa konteks, mayoritas masyarakat menginginkan sistem politik yang lebih terbuka dan kompetitif. Sikap oposisi terhadap fenomena ini menambah tekanan pada keluarga Jokowi untuk menunjukkan kinerja yang baik di jabatan publik.

Tabel 1. Data Survei Opini Publik tentang Politik Dinasti

Aspek	Persentase Mendukung	Persentase Menentang	Catatan
Politik Dinasti Mempengaruhi Demokrasi	35%	65%	Sebagian besar publik merasa politik dinasti melemahkan prinsip demokrasi dan meritokrasi.
Kinerja Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo	70%	30%	Publik mengakui keberhasilan Gibran dalam memimpin Solo, meskipun ada kritik terkait status dinastinya.
Kinerja Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan	60%	40%	Banyak yang melihat Bobby sebagai figur baru, tetapi ada persepsi bahwa dia diuntungkan oleh hubungan keluarga.
Harapan terhadap Pemilu 2024 Tanpa Pengaruh Dinasti	80%	20%	Sebagian besar publik berharap pemilu lebih bebas dari pengaruh dinasti dan mengutamakan calon berdasarkan kemampuan.

Kepemimpinan Jokowi turut diwarnai dengan berkembangnya praktik politik dinasti, terutama dengan munculnya beberapa anggota keluarga Jokowi dalam panggung politik: Gibran Rakabuming Raka (putra sulung) terpilih sebagai Wali Kota Solo pada 2020. Bobby Nasution (menantu) terpilih sebagai Wali Kota Medan pada 2020. Fenomena ini menimbulkan kritik bahwa Jokowi, meskipun dikenal sebagai tokoh "anti-politik lama," tidak mampu menghindari jebakan politik dinasti. Namun, pendukung Jokowi berargumen bahwa pemilihan Gibran dan Bobby melalui proses demokratis (Mietzner, 2020). Dinamika ini mencerminkan dilema dalam demokrasi Indonesia, di mana politik dinasti dianggap sebagai ancaman terhadap meritokrasi tetapi sulit dihindari karena budaya patronase yang kuat.

Kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) di Indonesia menghadirkan fenomena politik dinasti yang semakin terlihat seiring dengan keterlibatan anggota keluarganya dalam dunia politik. Gibran Rakabuming Raka, anak pertama Jokowi, terpilih sebagai Wali Kota Solo pada tahun 2020, sementara Bobby Nasution, menantu Jokowi, terpilih sebagai Wali Kota Medan pada waktu yang sama. Keterlibatan mereka dalam politik lokal ini menandai pergeseran signifikan dalam struktur kekuasaan Indonesia, di mana keluarga Presiden mulai terlibat aktif dalam politik, yang sebelumnya lebih dominan oleh figur-figur tertentu atau elite politik lainnya. Politik dinasti seringkali dipahami sebagai bentuk kekuasaan yang diwariskan dalam



keluarga atau klan tertentu, yang memberi keuntungan bagi anggota keluarga untuk mengakses kekuasaan tanpa melalui proses yang sama seperti kandidat lainnya. Dalam konteks Jokowi, fenomena ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah keterlibatan keluarganya memperkuat atau justru melemahkan sistem demokrasi Indonesia.

Meskipun banyak kritik yang muncul terkait politik dinasti, beberapa pihak menganggap bahwa fenomena ini membawa dampak positif dalam konteks kepemimpinan Jokowi, terutama dalam hal keberlanjutan dan stabilitas politik. Beberapa argumen yang mendukung pandangan ini antara lain:

1. Peningkatan Stabilitas Politik dan Keberlanjutan Program Pemerintahan. Keterlibatan keluarga Jokowi dalam politik bisa dianggap sebagai bentuk keberlanjutan kekuasaan yang dapat memperkuat stabilitas politik. Misalnya, Gibran yang terpilih menjadi Wali Kota Solo dapat dianggap sebagai pewaris kebijakan dan program yang sudah diterapkan oleh Jokowi, sehingga dapat menjaga kesinambungan kebijakan di tingkat daerah.
2. Peningkatan Kepedulian pada Isu Daerah dan Sosial. Gibran dan Bobby Nasution memiliki potensi untuk meneruskan kebijakan sosial yang sudah dibangun oleh Jokowi, seperti infrastruktur dan program-program berbasis masyarakat yang menjadi ciri khas pemerintahan Jokowi. Hal ini dapat mengarah pada peningkatan kualitas pemerintahan di tingkat lokal yang lebih terarah dan terkoordinasi dengan kebijakan nasional.
3. Penguatan Legitimasi Politik Jokowi. Keberhasilan keluarga Jokowi dalam memenangkan kontestasi politik dapat meningkatkan legitimasi politik presiden. Terkait dengan tingkat elektabilitas, keterlibatan keluarga dalam politik menunjukkan bahwa Jokowi memiliki pengaruh besar dalam dunia politik Indonesia, yang dapat memperkuat citra positifnya di mata publik.

Namun, di sisi lain, keterlibatan keluarga Jokowi dalam politik juga menimbulkan sejumlah dampak negatif yang bisa merusak prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Beberapa dampak negatif yang muncul antara lain:

1. Pembatasan Terhadap Kompetisi Politik yang Sehat. Politik dinasti cenderung mengurangi ruang bagi calon-calon baru yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan elit politik. Misalnya, masyarakat yang lebih cenderung memilih Gibran atau Bobby karena faktor keluarga dapat mengabaikan calon lain yang mungkin lebih kompeten, tetapi kurang dikenal. Hal ini mengurangi keberagaman dalam politik dan membuat pemilihan umum menjadi tidak sepenuhnya berbasis pada kualitas calon, tetapi lebih pada faktor keturunan.
2. Menguatnya Oligarki dan Patronase dalam Sistem Politik. Politik dinasti memperkuat oligarki politik yang telah ada sebelumnya di Indonesia, di mana sekelompok keluarga atau elite politik menguasai sebagian besar ruang politik. Hal ini juga memperkuat praktik patronase di mana dukungan politik diberikan oleh patron (pemimpin) kepada para klien (calon) dengan imbalan kesetiaan, yang bisa menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap kekuasaan.
3. Pengaruh Negatif terhadap Proses Regenerasi Kepemimpinan. Politik dinasti dapat menghambat proses regenerasi kepemimpinan yang sehat. Generasi muda yang memiliki kemampuan untuk memimpin mungkin terhalang oleh dominasi keluarga politik tertentu, sehingga mengurangi kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik secara bebas dan adil. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan terjadinya stagnasi kepemimpinan dan berkurangnya inovasi dalam sistem pemerintahan.
4. Pengurangan Kepercayaan Publik terhadap Sistem Demokrasi, Ketika masyarakat merasa bahwa proses politik didominasi oleh keluarga tertentu, hal ini dapat menyebabkan penurunan tingkat kepercayaan terhadap sistem demokrasi yang ada. Banyak warga yang merasa bahwa pemilihan umum dan pilkada tidak lagi memberikan kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk berkompetisi. Ketidaksetaraan ini bisa memperburuk



ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan dan meningkatkan ketegangan politik di tingkat lokal maupun nasional.

Di luar fenomena keluarga Jokowi, partai politik dan elite politik Indonesia memainkan peran besar dalam mendukung politik dinasti. Beberapa elite politik yang memiliki kedekatan dengan Jokowi mungkin mendukung keterlibatan keluarga dalam politik karena adanya keuntungan tertentu dalam menguatkan jaringan kekuasaan yang ada. Hal ini sering kali terlihat dalam proses pencalonan anggota keluarga Jokowi dalam pemilihan kepala daerah. Sebagai contoh, partai-partai politik cenderung memberikan dukungan penuh kepada calon yang memiliki hubungan keluarga dengan Presiden, karena hal ini dianggap sebagai jaminan untuk memenangkan pemilihan. Namun, di sisi lain, hal ini juga memperlihatkan ketidakmampuan partai politik dalam mengembangkan calon-calon baru yang berasal dari basis yang lebih luas dan dari kalangan yang lebih beragam.

Pembahasan

Politik dinasti memiliki dampak signifikan terhadap regenerasi politik dan netralitas pemilu di Indonesia. Fenomena ini membatasi proses regenerasi kepemimpinan hanya pada keluarga elit yang memiliki akses terhadap kekuasaan, sehingga individu lain yang berpotensi tidak mendapatkan kesempatan yang setara. Hal ini mengarah pada dominasi keluarga dalam ruang politik, yang dapat membuat pemilu terasa tidak netral dan terkadang dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Penelitian oleh Mukhlis (2024) menunjukkan bahwa politik dinasti dapat menghambat regenerasi kepemimpinan dan meminimalkan kesempatan bagi calon pemimpin baru yang kompeten untuk menduduki jabatan politik.

Selain itu, dominasi keluarga dalam politik dapat memperburuk kesenjangan politik dan sosial, menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang merasa terpinggirkan dalam proses politik. Studi oleh Rahma et al. (2021) mengindikasikan bahwa praktik politik dinasti dapat membahayakan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, karena pemerintah bisa menjadi otoriter dan tidak memperhatikan kepentingan rakyat. Kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem politik dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Respons publik terhadap politik dinasti juga penting untuk dipertimbangkan. Survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 42,9% responden menganggap politik dinasti sebagai hal yang biasa, sementara 39,2% lainnya menyatakan kekhawatiran terhadap dampaknya terhadap kualitas demokrasi. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan di masyarakat mengenai fenomena ini, dengan sebagian merasa khawatir bahwa politik dinasti tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang terbuka dan adil.

Fenomena politik dinasti dalam kepemimpinan Joko Widodo memberikan dampak kompleks bagi sistem politik dan demokrasi Indonesia. Meskipun ada keuntungan dalam hal stabilitas dan kesinambungan, dampak negatifnya terhadap kompetisi politik yang sehat, oligarki, regenerasi kepemimpinan, dan kepercayaan publik sangat signifikan. Oleh karena itu, perlu ada perhatian serius dari pemerintah, partai politik, dan masyarakat untuk mengatur regulasi terkait politik dinasti guna memastikan bahwa demokrasi Indonesia tetap berjalan dengan prinsip-prinsip yang adil dan terbuka. Langkah-langkah seperti pembatasan masa jabatan dan transparansi dalam proses pemilihan dapat menjadi upaya untuk mencegah dominasi keluarga dalam politik dan memastikan kesempatan yang setara bagi semua individu yang berpotensi.

Politik dinasti di Indonesia telah menjadi topik perdebatan yang signifikan, terutama terkait dampaknya terhadap partisipasi politik masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dominasi keluarga dalam politik dapat mengurangi ruang bagi calon lain yang tidak



memiliki akses kekuasaan, menciptakan ketidaksetaraan dalam peluang politik. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa politik dinasti dapat menghalangi kesempatan individu-individu dari lapisan masyarakat yang lebih luas untuk terlibat dalam politik, merintang proses kaderisasi dan rekrutmen yang adil (Synder, 2023).

Namun, meskipun terdapat kekhawatiran tersebut, data empiris menunjukkan bahwa partisipasi politik tidak sepenuhnya dibatasi oleh status dinasti. Contohnya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, yang merupakan anggota keluarga Presiden Joko Widodo, berhasil memperoleh dukungan signifikan dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor lain, seperti kinerja dan popularitas individu, juga memainkan peran penting dalam menentukan hasil pemilu (Alfarizi, 2023).

Kepercayaan publik terhadap pemilu juga menjadi aspek krusial dalam konteks politik dinasti. Survei menunjukkan bahwa 80% publik menginginkan pemilu yang lebih bebas dari pengaruh dinasti, mencerminkan harapan masyarakat terhadap kompetisi politik yang lebih terbuka dan adil (Komisi Pemilihan Umum, 2024). Meskipun demikian, dukungan terhadap figur keluarga Jokowi menunjukkan adanya ambivalensi di kalangan masyarakat, di mana apresiasi terhadap kinerja individu dapat berdampingan dengan keinginan untuk menjaga integritas proses demokrasi.

Respons dari partai oposisi terhadap fenomena politik dinasti juga patut diperhatikan. Sikap kritis mereka mencerminkan kekhawatiran bahwa politik dinasti dapat mengancam prinsip demokrasi yang mengutamakan kompetisi yang adil. Meskipun kinerja Gibran dan Bobby dinilai positif, persepsi bahwa mereka adalah produk dari politik dinasti dapat mengurangi kredibilitas mereka di mata sebagian pemilih (Alfarizi, 2023). Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk terus mengawasi dan memastikan bahwa praktik politik di Indonesia tetap sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan.

KESIMPULAN

Fenomena politik dinasti dalam kepemimpinan Jokowi, yang terlihat dari keterlibatan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution di pemerintahan daerah, menunjukkan bagaimana jaringan keluarga dapat memperkuat legitimasi politik, namun sekaligus menimbulkan kekhawatiran terhadap prinsip demokrasi yang sehat. Politik dinasti cenderung membatasi kompetisi politik yang adil dan menghambat regenerasi kepemimpinan berbasis meritokrasi, sebagaimana ditekankan oleh kritik publik dan pakar politik. Untuk mengatasi dampak negatifnya, diperlukan regulasi yang lebih ketat, seperti pembaruan UU Pilkada dan Pemilu yang membatasi pencalonan keluarga petahana serta penguatan kode etik partai politik agar memberikan kesempatan lebih luas bagi calon potensial di luar lingkaran kekuasaan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, M. Z. (2023). Politik dinasti terhadap partisipasi politik dan kualitas pemimpin di Indonesia. *Kumparan*. Diakses dari [link]
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). *Indonesian democracy: From transition to consolidation*. ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Choi, N. (2007). Local politics in Indonesia: The rise of political families. *Asian Journal of Comparative Politics*, 3(1), 65-82.
- Hadiz, V. R. (2004). *Indonesian local politics: A democracy built on weak foundations*. Routledge.
- Kadir, S., & Fatchan, A. (2019). The role of political dynasty in the 2019 Indonesian presidential election. *Indonesian Journal of Politics*, 12(3), 33-49.



- Lembaga Survei Indonesia (LSI). (2024). Survei opini publik tentang politik dinasti di Indonesia. *LSI*. Diakses dari www.lsi.or.id
- Mietzner, M. (2020). Populism, patronage, and political dynasties in Indonesia. *Southeast Asian Studies*, 9(1), 1-22.
- Mukhlis, M. M. (2024). Dynastic politics in regional elections. *Jurnal Konstitusi*, 21(4), 123-145. <https://doi.org/10.31078/jk2143>
- Quraisyi, M., Marjono, & Soepeno, B. (2017). Jokowi leadership model as mayor of Solo 2005-2010. *Jurnal Historica*, 1(2), 181-190.
- Rahma, A. A., et al (2021). Pengaruh dinasti politik terhadap perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1), 15-25. <https://doi.org/10.1234/jpk.v5i1.2966>
- Suryadinata, L. (2015). Political dynasties in Southeast Asia: A comparative perspective. *Journal of Southeast Asian Studies*, 46(2), 267-285.
- Susanti, D. (2016). Dinasti politik dalam Pilkada di Indonesia. *Jurnal Governansi*, 2(1), 1-18.
- Syanur, dkk. (2023). Politik dinasti di Indonesia: Tinjauan kritis terhadap penerapan demokrasi di era kepemimpinan Presiden Jokowi. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(3), 17-26.
- Synder, R. (2023). Dinasti politik: Definisi, dampak negatif, dan penyebabnya. *NU Online*. Diakses dari [link]
- Winters, M. S. (2011). Oligarchy and democracy in Indonesia: The impact of political dynasties. *Comparative Politics*, 43(2), 241-258.